



Hilirisasi Menjadi Jawaban EUDR?

Meski data-data riset berkata sebaliknya, namun dialektika sawit negatif terus bergulir. Tak heran pihak seperti Uni Eropa merintang produk sawit dapat beredar di wilayahnya. Tapi tidak usah khawatir, hilirisasi sawit yang optimal bisa menjadi solusi jitu. Produk Sawit yang selama ini banyak diekspor, bisa diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga mengatasi hambatan ekspor ke wilayah yang memasang jaring-jaring penghalang. Terus dukung sawit kita ya.

**Selengkapnya di halaman 3*

PSR untuk Ketahanan Energi dan Pangan

Melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bisa diharapkan ada peningkatan signifikan dalam produktivitas kelapa sawit rakyat. Jika sebelumnya petani hanya mampu menghasilkan 2-3 ton CPO per hektar, dengan PSR peningkatannya bisa mencapai 5 ton per hektar atau lebih. Dengan keberhasilan PSR, petani lebih sejahtera, ketahanan energi dan pangan nasional pun terjaga.

**Selengkapnya di halaman 8*

Peta Jalan Sawit Indonesia Emas

Keberlanjutan menjadi kata kunci bagi Indonesia yang kini tengah mempersiapkan roadmap atau peta jalan sawit menuju Indonesia emas saat umur republik mencapai 100 tahun. Dengan postur industri kelapa sawit hulu hingga hilir yang berkelanjutan, misi *net zero emission* sektor industri semoga tercapai di 2050.

**Selengkapnya di halaman 11*



Dr. Sofyan A. Djalil

Editorial

Bukan hal yang mustahil Indonesia menuju ke masa emas di usia seabadnya. Hanya saja banyak aspek yang perlu diseriusi oleh berbagai pihak. Produktivitas sawit nasional hingga optimalisasi tampaknya masih menjadi PR bersama. Mekanisme serta kebijakan mesti disusun secara cepat dan tepat demi mencapai keberhasilan. Semoga buletin edisi keempat ini dapat memberikan gambaran keadaan dan perkembangan industri sawit Indonesia. Selamat membaca.

Hilirisasi Sawit, Apa Pentingnya?



Ilustrasi produk turunan kelapa sawit banyak yang bersinggungan langsung dengan kita. (dok. istimewa)

Hilirisasi menjadi bagian penting dalam khazanah industri Indonesia selama satu dekade belakangan. Pemerintah terus mendorong agar semua pihak dapat melakukan hilirisasi produk, mulai nikel hingga sawit.

Lalu apa pentingnya?

Hilirisasi atau dalam bahasa Inggris *downstreaming* merupakan langkah yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan nilai suatu produk sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Program hilirisasi pada ujungnya membuka lapangan pekerjaan yang luas, baik di pusat maupun daerah. Meskipun demikian, proses menuju hal tersebut memerlukan investasi yang cukup besar, SDM yang unggul ditambah kebijakan Pemerintah yang mendukung.

Menurut Dr. Ir. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI, hilirisasi sangat penting karena dapat meningkatkan nilai tambah produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Proses ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi suatu daerah. Namun pelaksanaannya memerlukan investasi, riset yang mendalam serta kebijakan serta infrastruktur yang mendukung dan memadai.

Disebutkan Tungkot dalam publikasinya, 15 Maret 2024, diantara manfaat hilirisasi adalah memberikan nilai tambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan produk baru yang bisa dipasarkan secara global, serta optimalisasi sumber daya alam.

Khusus dalam sawit, hilirisasi bisa dikatakan sebagai suatu optimalisasi produk-produk turunan dari kelapa sawit menjadi produk yang lebih memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sampai saat ini industri sawit Indonesia terus berusaha melakukan hilirisasi agar mencapai

manfaat sawit yang optimal. Telah terdapat 179 produk turunan sawit dan konon masih terdapat 30% potensi yang mesti dikembangkan lebih lanjut di masa datang.

Tungkot memberikan beberapa contoh yang menarik. Dari tandan buah segar (TBS) sawit saja misalnya, bisa menghasilkan rayon, karbon, *pulp and paper*, serta kompos. Dari minyak sawit atau dikenal dengan nama CPO, bila diolah secara cermat bisa menelorkan produk emulsi, margarin, minyak goreng, minyak merah, shortening, susu kental manis, *confectionary ice cream*, dan yoghurt. Adapun minyak turunan dari industri oleokimia memunculkan pelumas, biodiesel, senyawa ekstrak, lilin, kosmetik, farmasi, asam lemak sawit, *fatty alcohol*, senyawa epoksi dan senyawa hidroksi. Adapun dari cangkang sawit, bisa dimunculkan produk sangat penting seperti biofuel, pakan ternak, bahan bakar dan bioplastik.

Perlu diketahui bersama, sebelum tahun 2010, hilirisasi minyak sawit Indonesia sebagian besar dilakukan oleh negara-negara importir minyak sawit. Kondisi tersebut membuat Indonesia tergantung pada pasar minyak sawit dunia dan nilai tambah sawit dinikmati oleh negara importir yang saat itu diperkirakan mencapai 32,8 miliar dolar per tahun. Kemampuan hilirisasi sawit nasional baru dimulai setelah tahun 2015, setelah diintegrasikannya kebijakan hilirisasi sawit domestik dengan kebijakan perdagangan internasional yakni pungutan ekspor minyak sawit.

Sementara itu, menurut perhitungan Dr. Saleh Husin, seorang ekonom dari UI (BPDPKS 18/4/24), apabila ekspor produk hulu sawit turun 5 persen tapi produk hilir meningkat 15 persen, maka devisa nasional masih mengalami peningkatan 7 miliar dolar per tahun. Dengan demikian, maka PDB yang merupakan indikator ekonomi juga akan meningkat. (AM)

Hilirisasi Menjadi Jawaban EUDR?



Ilustrasi buah sawit dan EUDR (dok. istimewa)

Dialektika tentang sisi negatif sawit terus berkembang. Namun data-data riset dalam jangka panjang telah membuka mata banyak orang bahwa sawit itu benar-benar *miracle plantation*. Repotnya, karena kepentingan tertentu, produk sawit sering dihalang-halangi dengan berbagai dalih yang sulit dimengerti. Apa solusinya?

Banyak hal yang awalnya terdengar logis tentang isu negatif sawit, kini terbukti tidak demikian. Sawit, antara lain, pernah difitnah merupakan tanaman haus air dan berkontribusi hilangnya hutan tutupan sehingga dapat mengganggu kebutuhan umat manusia. Karena itulah maka sawit dihalang-halangi masuk Uni Eropa melalui EUDR. Namun kini terbukti secara ilmiah bahwa kebutuhan air bagi sawit lebih rendah dari tanaman monokultur lain. Anehnya, bunga matahari yang memakan lahan lebih besar jarang diterpa isu negatif.

“Saya kira stigma yang diberikan untuk sawit disebabkan oleh persaingan bisnis yang melibatkan negara-negara maju, terutama di Eropa,” ujar Ahmad Muslim, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, yang dikutip pada laman GAPKI 27/6/24.

Oleh karena itulah, Muslim berpendapat bahwa sebaiknya Indonesia mengurangi ketergantungannya pada ekspor dengan cara optimalisasi hilirisasi sawit. Salah satunya, Pemerintah terus memberikan dukungan kepada industri hilir, seperti infrastruktur, listrik, pasokan gas serta soal-soal teknis seperti perizinan investasi. Logikanya, kalau CPO yang selama ini banyak diekspor, bisa diolah menjadi produk bernilai tambah maka akan membantu mengatasi hambatan ekspor CPO ke negara-negara yang memasang jaring-jaring penghalang.

Sejalan dengan hal di atas, Kepala Divisi Teknologi Proses, Fakultas Teknologi IPB, Erliza Hambali menyatakan, keunggulan minyak sawit adalah kemampuannya untuk menggantikan beragam bahan baku dalam menghasilkan produk olahan. Hebatnya, biaya produksi minyak sawit lebih rendah dari minyak lainnya. Ia mencontohkan, minyak sawit bisa menggantikan minyak kakao dalam produksi coklat. “Harga minyak sawit berkisar Rp 28 ribu – Rp 30 ribu per kg, sedangkan minyak kakao bisa lebih Rp 100 ribu per kg,” ujarnya (Kompas.id 26/6/24).

Selain itu, 560-an produk petrokimia yang dihasilkan dari minyak bumi, sebagian besar bisa digantikan atau dibuat dengan menggunakan minyak sawit. “Selama ini, minyak bumi dianggap sebagai hasil tambang yang tidak berkelanjutan dan salah satu pemicu kerusakan lingkungan. Ternyata, fungsi minyak bumi bisa digantikan oleh minyak sawit. Ini menjadi pertanyaan untuk pihak-pihak yang membenci sawit, mana lebih baik antara minyak bumi dan minyak sawit,” ucap Erliza.

Presiden Joko Widodo senantiasa wanti-wanti pentingnya hilirisasi dan industrialisasi kelapa sawit untuk dilakukan di Tanah Air mengingat potensinya yang sangat besar. Menurut Presiden, potensi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dimiliki Indonesia mencapai 52 juta ton per tahunnya sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan dan harus kita paksa untuk dilakukan,” ujar Presiden Jokowi saat meresmikan pabrik biodiesel milik PT Jhonlin Agro Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pada 21 Nopember 2021 sebagaimana dilansir dalam laman Kominfo pada hari yang sama. (AM)

Keniscayaan Hilirisasi Bensin Sawit



Ilustrasi hilirisasi sawit untuk bensin (dok. istimewa)

Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia dalam rangka mengembangkan energi hijau. Salah satunya, hilirisasi bensin sawit (bensa) yang telah berhasil diujicoba. Dengan bensin hijau ini, Indonesia relatif berpotensi dapat mengatasi ketergantungan impor BBM, hingga bisa mewujudkan komitmen *net zero emissions* lebih cepat.

Di tengah isu perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya energi fosil, energi hijau hadir sebagai solusi masa depan. Indonesia dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia memiliki peluang besar menjadi produsen energi baru terbarukan (EBT). Saat ini produk utama kelapa sawit hingga limbahnya sudah dapat dijadikan beragam jenis EBT.

Dari riset yang cukup panjang, kelapa sawit akhirnya bisa menghasilkan bensin sawit yang ramah lingkungan. Pada laman gapki.id (10/5/2024) misalnya, Yannes Martinus, akademisi ITB, mengatakan bensin merupakan bahan bakar dengan emisi gas buang yang jauh lebih rendah dari BBM fosil. Penggunaan Bensin dapat berkontribusi besar pada pengurangan efek rumah kaca serta mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil.

Sebagai informasi, dikutip dari CNBC (23/4/2024), Indonesia merupakan negara net importir minyak bumi. Hal ini berarti bahwa kebutuhan minyak bumi di Indonesia lebih besar daripada produksi minyak bumi nasional. Pada tahun 2022 misalnya, defisit minyak bumi Indonesia mencapai sekitar 840 ribu barel per hari (bph). Defisit ini ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

PR besar Indonesia untuk merealisasikan bensin sawit antara lain membangun pabrik katalis dengan kapasitas besar. Dalam catatan CNBC (1/2/2024)

Kepala Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis ITB, Melia Laniwati Gunawan, menjelaskan, katalis merupakan zat kimia yang berfungsi untuk mempercepat pengolahan reaksi dalam proses produksi bensin sawit. Dengan katalis produksi secara massal bisa lebih cepat dan efisien.

Kepada CNBC, Melia juga menjelaskan bahwa bensin sawit berbeda dengan biodiesel yang mengandung campuran minyak sawit dan solar. Bensin sawit terdiri dari 100 persen minyak sawit. Hal ini yang kemudian yang menjadi salah satu sebab harga bensin sawit jauh lebih mahal dari bensin BBM, sehingga sampai saat ini masih belum dapat dikomersialkan. Harga bensin sawit menurut Melia berkisar Rp. 20.000 per liter.

Selain harga keekonomiannya yang jauh lebih tinggi dari BBM, bensin sawit serta hilirisasi lainnya menghadapi kendala di sektor hulu, yaitu pasokan minyak kelapa sawit. Produktivitas kelapa sawit Indonesia masih rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan semua sektor. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI kepada Warta Ekonomi (4/7/2024) mencatat produktivitas CPO secara nasional masih pada kisaran 4 ton/ ha. Sementara idealnya bisa mencapai 7-8 ton CPO per hektar.

Replanting, terutama program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang sampai saat ini terbilang belum maksimal, merupakan solusi terealisasinya produk-produk hilirisasi yang memerlukan alokasi CPO. Bila produk hilir seperti bensin sawit bisa terwujud, maka mungkin akan lebih dari sekadar menghasilkan energi ramah lingkungan, karena pemanfaatannya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan akses energi bagi masyarakat pedesaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses ini memerlukan komitmen kuat dan kerjasama yang baik dari semua pihak. (MAS)

Diplomasi Kelapa Sawit: Menjembatani Keberlanjutan



Ilustrasi diplomasi (dok. istimewa)

Pelatihan kelapa sawit berkelanjutan yang diadakan di Bogor untuk 17 negara peserta, termasuk Argentina, Bolivia, Brasil, Ekuador, Ghana, dan lain-lain, patut diacungi jempol. *Event* ini membuka peluang kerjasama serta memperkuat posisi Indonesia dalam memajukan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

Kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis bagi Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan di pasar global. Dari mulai kampanye negatif terkait deforestasi dan isu lingkungan, hingga beragam regulasi yang menyulitkan produk kelapa sawit seperti yang diterapkan Uni Eropa.

Padahal berdasarkan data Input-output Indonesia tahun 2016, industri kelapa sawit di Indonesia menjadi penopang lebih dari 18 juta tenaga kerja, secara langsung maupun tidak langsung (Afandi, 2023). Industri sawit juga menjadi penyumbang devisa ekspor sebesar USD 31 miliar pada tahun 2023 (Paspi).

Bila kendala ini dibiarkan, atau lebih jauh lagi regulasi Uni Eropa dijadikan benchmark oleh negara-negara lain, Indonesia bisa jadi akan menghadapi masalah dalam pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan (*no poverty*) sendiri merupakan tujuan pertama dari 17 tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disusun PBB (kemlu.go.id).

Peran diplomasi menjadi krusial untuk mengamankan keberlangsungan kelapa sawit. Melalui jalur diplomasi, Indonesia bisa mengkomunikasikan berbagai upaya keberlanjutan yang telah dilakukan dalam mengelola industri kelapa sawit, seperti sertifikasi ISPO dan praktik-praktik terbaik di lapangan. Diplomasi juga dapat membuka peluang kerjasama antar negara penghasil kelapa sawit untuk memperkuat daya saing

dan menghadapi tantangan bersama. Kerjasama dalam riset, pengembangan teknologi, dan promosi bersama dapat meningkatkan nilai tambah kelapa sawit di pasar internasional.

Kegiatan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Kementerian Keuangan 22 Juni – 2 Juli tersebut merupakan langkah nyata diplomasi kelapa sawit. Dengan menyaksikan langsung praktik-praktik terbaik di lapangan, peserta pelatihan dapat memahami komitmen Indonesia terhadap kelapa sawit berkelanjutan.

“Harapannya pelatihan ini juga akan memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara-negara Global South, melakukan kolaborasi, riset, dan pendidikan,” ungkap Wakil Rektor IPB Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat Agromaritim, Prof. Ernan Rustiadi, dikutip dari Antara (25/6/2024).

Sementara Dirjen Amerika dan Eropa Kemlu, Umar Hadi, dilansir dari infosawit.com, lebih menekankan pada bagaimana berbagai pihak dapat memastikan kesejahteraan petani rakyat dalam sektor agrikultur. Hal ini demi mencapai tujuan dunia yang bebas kemiskinan dan kelaparan sebagaimana tertuang dalam SDGs.

Upaya diplomasi melalui event seperti pelatihan ini dapat menjadi bukti nyata melalui kerjasama internasional dan komitmen pada keberlanjutan, Indonesia dapat memimpin industri kelapa sawit berkelanjutan, memperkuat posisinya di pasar global, dan mendukung pengentasan kemiskinan. (AM)

Lampu Kuning SDM di Perkebunan Sawit Rakyat



Ilustrasi petani sawit (dok. canva)

Pengangguran remaja di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Namun di sisi lain, ternyata anak-anak pekebun sawit enggan meneruskan pekerjaan orang tuanya yang berkonotasi 3D (*dirty, difficult dan dangerous*). Mereka lebih suka kerja pabrik dan kantor yang secara gengsi lebih terpandang. Fenomena perkebunan sawit di negara jiran yang sudah lama ditinggalkan anak mudanya, bisa terjadi di tanah air.

“Ancaman yang paling besar di perkebunan rakyat adalah karena permasalahan regenerasi. Kebanyakan, putra putri petani sawit itu memang tidak tertarik untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi ini tidak terjadi di perkebunan sawit saja, ini saya kira hampir di seluruh pertanian ya,” ujar Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia, Darmono Taniwiryono dilansir oleh industry.co.id (1/12/23).

Pendidikan anak-anak petani yang makin baik dan seiring dengan kemajuan teknologi yang mengiringinya ternyata telah membuat orientasi pekerjaan pemuda 30 tahun silam berbeda dengan pemuda masa kini. Dalam pandangan Darmono, anak-anak milenial sekarang kurang menyukai pekerjaan-pekerjaan yang kotor dan keras, seperti yang dilakukan generasi sebelumnya. Apabila hal ini dibiarkan tanpa solusi dan perencanaan yang jelas, maka bisa dipastikan dapat mempengaruhi kinerja sawit dan sekaligus pendapatan nasional Indonesia.

Kalau Malaysia mengambil *exit strategy* dengan memengundang lebih banyak warga Indonesia untuk bekerja di perkebunan sawit mereka, apakah Indonesia

juga akan melakukan yang sama dengan mungundang pemuda lain untuk datang? Mendatangkan pihak lain perlu biaya dan gaji yang tidak sedikit, yang akhirnya akan meningkatkan ongkos produksi dan daya saing produk. Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun lalu perkebunan sawit Indonesia secara keseluruhan mampu menyediakan lapangan pekerjaan 16 juta orang, baik langsung maupun tak langsung.

Di masa datang, untuk menyelesaikan pekerjaan rumah di atas, maka diupayakan SDM yang unggul yang mampu berperan dalam mencapai sasaran strategis, khususnya untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas pekebun. Selain itu, menurut Darmono, diperlukan adanya mekanisasi aplikasi dari hulu ke hilir. Investasi dan penyesuaian dengan perkembangan tidak bisa ditunda. Industri sawit tidak bisa diperlakukan secara tradisional.

Cepat atau lambat semua pihak harus mempersiapkan diri dari sisi sumber daya manusia dan teknologi sehingga industri kelapa sawit milik rakyat tetap menjadi sesuatu yang menarik bagi kalangan anak-anak pekebun. Pemerintah, selain sibuk membantu petani dengan aktivitas peremajaan sawit rakyat (PSR), namun juga sudah harus segera membangun basis bagi pertanian rakyat yang modern.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta pada Agustus 2022, atau berada pada 5,86 persen dari total Angkatan kerja nasional. Sayangnya, paling banyak berasal dari kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 2,54 juta atau 30,12 persen dari Angkatan kerja disusul kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 1,86 juta jiwa atau 22,03 persen. (MAS)

Menjawab Tantangan Pasar Komoditas Sawit Dunia



Ilustrasi pasar saham (dok. Freepik)

Sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang berkontribusi 3,5 persen dari PDB (Kemenperin, 2024). Dengan luasan kebun mencapai kisaran 17 juta hektar, Indonesia memproduksi nyaris 60 persen minyak sawit dunia. Bahkan sebanyak 18 juta penduduk menggantungkan hidupnya dari sawit, baik langsung maupun tidak langsung.

Meski menjadi juara di bidang persawitan, Indonesia sering mendapat kritik cukup tajam khususnya yang terkait lingkungan seperti deforestasi hutan tropis, berkurangnya keanekaragaman hayati, kebakaran lahan gambut serta konflik sosial di perkebunan sawit. Kenyataan itu acapkali menimbulkan persepsi yang negatif terhadap citra sawit Indonesia di kancah global. Untuk itulah diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Menurut WRI Indonesia (23/4/24), Pemerintah Indonesia sendiri sudah mendorong minyak sawit yang berkelanjutan, antara lain dengan mewajibkan pengusaha sawit meraih *Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System*, atau yang dikenal dengan istilah ISPO yang akan memastikan usaha sawit ramah lingkungan. Selain itu, diupayakan penegakan aturan dan program, seperti peremajaan sawit rakyat, fasilitasi sarana dan prasarana, dan pendanaan peremajaan kelapa sawit. Dan yang juga penting, diperlukan sistem ketertelusuran guna merekam jejak produk kelapa sawit hingga ke asal-usulnya.

Ada tiga hal yang berdasarkan pengamatan WRI Indonesia, perlu segera dilaksanakan dalam rangka ISPO dan ketertelusuran dimaksud. Pertama, pentingnya meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh sertifikasi ISPO. Kenyataan saat ini dimana hanya ada 1 penyuluh untuk dua desa dirasakan kurang

dan tidak memadai. Para penyuluh tersebut, mestinya tidak hanya sebagai guru dalam bertani sawit, namun harus menjadi pendamping dalam mencapai ISPO.

Hal kedua yang penting adalah penataan pengepul sawit. Pengepul sawit ini memiliki peranan yang tidak kecil dalam hal ketertelusuran rantai pasok sawit. Untuk itulah diperlukan regulasi khusus yang terkait dengan aktifitas pengepul ini dan kegiatan mereka harus terdaftar. Dengan demikian, mereka akan memberikan laporan atas semua transaksinya, termasuk data geospasial dan data produksi yang akurat.

Masih menurut WRI Indonesia, hal penting terakhir adalah melakukan perpanjangan moratorium sawit dan penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, moratorium lahan sawit dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.8 tahun 2018 yang berakhir pada tahun 2021 yang lalu. Inpres ini bertujuan antara lain untuk mengevaluasi perizinan kelapa sawit seta mencapai keberlanjutan sawit Indonesia. Dikatakan juga bahwa moratorium ini mampu menurunkan deforestasi hingga 28 persen.

Masalah utama yang dihadapi petani sawit yang menguasai 40 persen dari lahan sawit Indonesia, menurut Rostanto, manajer program Yayasan Kehati (12/01/23), adalah pemenuhan aspek legalitas lahan kebun dan usaha budidaya, juga praktik penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan penanganan limbah B3 serta pembiayaan persiapan maupun audit ISPO. Maklumlah, beberapa perkebunan sawit saat ini masih statusnya masih belum jelas karena berada dalam kawasan yang dianggap hutan, sehingga belum bersertifikat. Selain itu, usahanya juga sering belum terdaftar atau tidak punya legalitas. (AM)

Pentingnya PSR untuk Ketahanan Energi dan Pangan



Kota yang penuh dengan penggunaan energi (dok. wikipedia)

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah menjadi program penting dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat di Indonesia. Selain dapat menggantikan tanaman sawit yang sudah tua dan tidak produktif dengan tanaman baru yang lebih produktif, program ini juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Implikasi program ini tentu akan berdampak luas pada kenaikan produksi nasional untuk mendukung ketahanan energi dan pangan nasional.

Melalui PSR, diharapkan ada peningkatan signifikan dalam produktivitas kelapa sawit rakyat. Jika sebelumnya petani hanya mampu menghasilkan 2-3 ton CPO per hektar, tetapi dengan bibit unggul dan implementasi *Best Management Practices*, peningkatannya bisa mencapai 5 ton per hektar atau lebih. Tentu saja pendapatan petani akan meningkat dan usaha kebun sawit dapat keberlanjutan.

Berdasarkan data BPS, tahun 2022, dari tanaman menghasilkan (TM) seluas 4,8 juta ha, perkebunan sawit rakyat menghasilkan produksi CPO sebesar 16,3 juta ton, menyumbang 34% dari total produksi nasional. Berdasarkan analisa IPOSS, pada tahun 2024 perkebunan sawit rakyat yang sudah tua dan tidak produktif mencapai $\pm$ 2 juta ha. Diperkirakan produksi sawit rakyat akan menurun seiring dengan bertambahnya tanaman yang semakin tua, apabila tidak dilakukan PSR.

Keterbatasan petani dalam melakukan peremajaan, baik dari sisi kemampuan teknis, pengetahuan maupun pendanaan menjadi tantangan besar dalam keberlanjutan usaha sawitnya. Maka, pentingnya program PSR untuk membantu pembiayaan peremajaan kebun petani yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Diperkirakan biaya peremajaan dapat mencapai 50 - 70 juta per hektar dimulai dari *land clearing*, penanaman, perawatan hingga tanaman siap dipanen pada umur 3 tahun.

Sayangnya, dalam 3 tahun terakhir, realisasi PSR

baru mencapai rata-rata 42 ribu hektar/tahun, jauh di bawah target Presiden RI, yang menetapkan 180 ribu hektar/tahun. Capaian ini juga masih sangat sedikit dibandingkan dengan luasnya perkebunan sawit yang sudah tua, tidak menghasilkan, dan rusak, yang perlu diremajakan.

Dari hasil simulasi IPOSS, jika capaian PSR tetap bertahan seluas 42 ribu hektar per tahun, maka diperkirakan dalam 36 tahun yang akan datang, luas sawit yang diremajakan hanya mencapai 1,5 juta hektar, yakni 23% dari total luas perkebunan sawit rakyat. Sementara itu, tanaman sawit tua akan terus bertambah setiap tahun, hal ini dapat mengakibatkan turunnya produksi dari 16,3 juta ton CPO pada tahun 2022 menjadi 12,5 juta ton pada tahun 2060.

Sebaliknya, apabila realisasi PSR dapat mencapai 180-200 ribu hektar per tahun, maka produksi sawit rakyat dapat meningkat hingga mencapai 32 juta ton CPO pada tahun 2045 (CAGR 2,8%).

Maka dari itu, bagi para pelaksana kebijakan PSR, adalah penting untuk memahami mengapa ditetapkan target luas PSR per tahun seluas 180 ribu hektar. Yakni untuk mendapatkan persentase luas TM yang lebih tinggi, dan produktivitas yang meningkat. Dalam pelaksanaan PSR, capaian luas itu sangat penting, namun tidak boleh mengabaikan kualitas hasil peremajaan itu sendiri, agar tanaman prima sejak dini. Tentu saja hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa adanya upaya serius. Perlu adanya pendekatan model kelembagaan seperti yang dahulu dilakukan pada program PIR-Trans di mana ada peran *leadership* yang kuat, solutif dan progressif di tingkat pusat dan provinsi untuk mendorong proses pendaftaran, verifikasi, pelaksanaan dan pembiayaan yang lebih cepat, akurat dan berhasil.

Dibutuhkan sistem dan tata kelola yang lebih utuh dan terintegrasi, di bawah lembaga pemerintah yang khusus menangani kelapa sawit. (MA)

Reinterpretasi Dampak Sosial Kelapa Sawit



Pekerja dan keluarganya di Kebun Kelapa Sawit. (dok. RSPO)

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia dari sektor perkebunan. Dalam penentuan komoditas perkebunan strategis, beberapa pemangku kebijakan kerap menggunakan nilai ekspor untuk menghitung kontribusi suatu komoditas, termasuk kelapa sawit. Nilai ekspor dinilai mewakili permintaan global dan memberikan pendapatan bagi negara. Sebagai contoh, pada 2023, ekspor lemak dan minyak hewan/nabati (termasuk kelapa sawit) menyumbang US\$28,45 miliar atau 10,2% dari neraca dagang non-migas (Kementerian Perdagangan, 2023).

Konsep ini mengaitkan komoditas, khususnya kelapa sawit, dengan nilai keekonomian. Akibatnya, kebijakan publik dinilai cenderung memprioritaskan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Argumentasi ini juga dikaitkan dengan isu-isu di sekitar industri sawit, menciptakan narasi “ekonomi versus sosial” atau “ekonomi versus lingkungan” yang membuat publik harus memilih antara kelapa sawit atau kepentingan sosial dan lingkungan. Akibatnya, kontribusi kelapa sawit di luar aspek ekonomi seringkali diabaikan.

Padahal, berdasarkan data Dirjenbun (2023), industri kelapa sawit mampu menyerap 7,1 juta tenaga kerja langsung dan jika dikalikan dengan indeks *multiplier* tenaga kerja (Affandi, 2023) maka dihasilkan 11,5 juta tenaga kerja tidak langsung. Sehingga total terdapat 18,8 juta tenaga kerja yang terserap di perkebunan dan pabrik pengolahan. Hal ini dapat membuktikan bahwa industri sawit mampu memenuhi unsur sosial dalam memberikan pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Fakta ini kemudian dipertegas melalui khasanah ilmiah bahwa industri kelapa sawit layak masuk dalam komoditas strategis dikarenakan juga kontribusi yang diberikan dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut Affandi (2023), penentuan komoditas prioritas perlu kembali melalui keilmuan ekonomi sumberdaya, yakni melalui analisa dampak *Forward Linkage* (FLI)

dan *Backward Linkage* (BLI) dan analisa pengganda (*output*, pendapatan dan tenaga kerja).

Hasil Perhitungan FLI, BLI, dan Analisis Pengganda

	BLI	FLI	Oj	Ij	Lj
Minyak Sawit Mentah	1,86	1,30	2,09	6,85	19,16
Kopi Olahan	0,68	1,20	1,92	5,86	15,13
Teh Olahan	0,67	1,29	2,06	2,47	3,07
Gula	1,03	1,05	1,69	2,14	3,53
Karet Remah & asap	1,38	1,19	1,91	4,89	12,99

Sumber: Affandi (2023)

Perhitungan BLI dan FLI kelapa sawit merupakan yang paling tinggi dibandingkan sektor perkebunan lainnya (angka >1 menunjukkan dampak yang tinggi). Menandakan bahwa kelapa sawit memberikan dampak besar ke hulu (BLI) maupun ke hilir (FLI). Sedangkan komoditas lain lebih memberikan dampak pada sektor hilir. Besarnya dampak ke sektor hulu sangat penting mengingat petani dan mayoritas pekerja berada di sektor hulu.

Selain itu, nilai tambah bagi ekonomi produk kelapa sawit juga merupakan yang tertinggi pada angka 6,85x. Artinya setiap kenaikan produksi senilai Rp 1 juta akan berdampak pada total nilai tambah sebesar Rp 6,85 juta (perhitungan Ii). Kenaikan ini juga dapat memberikan manfaat bagi 19-20 tenaga kerja (perhitungan Li).

Agar industri sawit dapat berkelanjutan, diperlukan penegasan dan reinterpretasi aspek sosial dalam memandang komoditas unggulan ini. Dengan demikian, kelapa sawit tidak hanya dipandang sebagai komoditas yang lekat dengan aspek ekonomi, tetapi juga secara berimbang dikaitkan dengan dampak sosial bagi masyarakat. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi prioritas kebijakan publik dalam mendukung industri yang telah menjadi “rumah” bagi lebih dari 18 juta penduduk Indonesia. (OP)

Target Produksi 2045: Intensifikasi atau Ekstensifikasi?



Ilustrasi pesawat melintasi kebun sawit (dok. istimewa)

Industri kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dan penciptaan lapangan kerja. Targetnya, pada 2045, produksi CPO mencapai 100 juta ton dari 50 juta ton pada 2023, seperti diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan, di *World Economic Forum* (WEF) 2023 di Swiss. Namun, target tersebut merupakan tantangan besar, sebab tidak mudah meningkatkan produksi dari 50 juta ton di 2023, menjadi 100 juta ton di 2045. Perlu strategi untuk mencapainya, apakah tetap dengan ekstensifikasi atau mampukah intensifikasi?

Ekstensifikasi memang sudah lumrah dilakukan. Pertambahan produksi CPO dalam 23 tahun terakhir tidak terlepas dari peningkatan luas area. Tercatat produksi CPO naik 6x lipat sejak tahun 2001 hingga tahun 2023. Salah satu faktornya adalah penambahan luas sawit sebanyak 3,5x lipat. Ini menunjukkan peningkatan luas berpengaruh sekitar 60% terhadap produksi.

Namun, strategi ekstensifikasi ini tidak lagi didukung, baik oleh pemerintah maupun pasar internasional. Adanya kebijakan moratorium perluasan kelapa sawit yang dikaitkan dengan isu deforestasi, menunjukkan strategi ekstensifikasi ini dapat menjadi boomerang. Dari hasil simulasi proyeksi kenaikan produksi, target 2045 tersebut sebenarnya dapat dipenuhi hanya dengan strategi intensifikasi. Ada constraint yang perlu diperhatikan, yakni perbaikan mutu benih sawit, kesuksesan peremajaan (termasuk program PSR), penerapan *Best Management Practices* (BMP) dan *Good Agricultural Practices* (GAP), serta pendampingan petani dan korporasi.

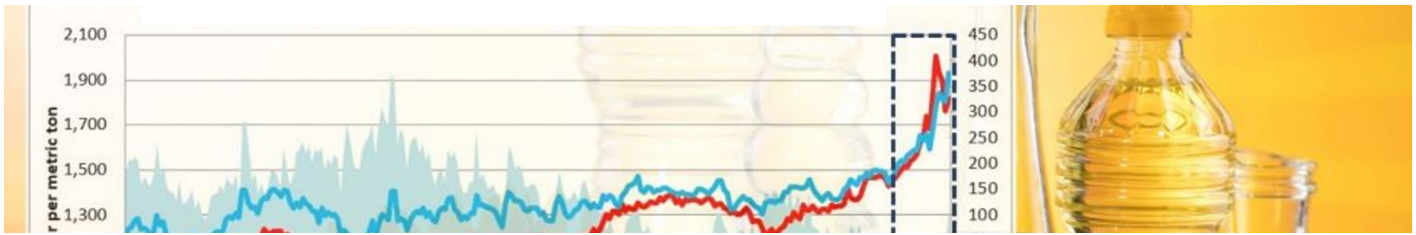
Berdasarkan hasil analisis luas kelapa sawit nasional, BPS (2023), diketahui bahwa persentase luas tanaman

menghasilkan (TM) pada tahun 2022 sebesar 75% dari total sawit nasional. Persentase tersebut tidak standar, di mana seharusnya sekitar 88%. Artinya seharusnya luas TM bisa bertambah 2.074.138 hektar dari 12.341.984 hektar menjadi 14.416.122 hektar. Artinya tanaman tidak menghasilkan (TTM) dan tanaman tua (>25 tahun) yang ada saat ini seharusnya diremajakan secara bertahap sehingga nantinya akan dihasilkan produktivitas 6 ton per hektar pada tanaman baru. Pada akhirnya akan ada penambahan produksi CPO sebesar 12,6 juta ton.

Di perkebunan rakyat, dari program PSR dapat diharapkan terjadi peningkatan produksi CPO. Di mana dari 16,3 juta ton CPO pada tahun 2022 naik 32 juta ton CPO pada tahun 2045 (CAGR 2,8%). *Incremental* produksi tersebut diperoleh dari hasil peremajaan tanaman tua, TTM dan tanaman rusak milik petani. Produktivitas petani akan naik dari rata-rata 3,4 ton per hektar menjadi 6 ton per hektar per tahun. Apabila strategi PSR tersebut berhasil dilaksanakan secara kontinu dan konsisten seluas 180 – 200 ribu hektar per tahun, maka produksi CPO dari perkebunan sawit rakyat dapat meningkat sebesar 15,7 juta ton pada tahun 2045

Target produksi juga dapat didongkrak dari peningkatan produktivitas di perkebunan sawit milik swasta dan negara, yang pada tahun 2022 rata-ratanya sebesar 3,9 ton per hektar ditingkatkan menjadi 6,5 ton per hektar. Juga dengan meningkatkan luas TM menjadi 88%, sehingga diperoleh peningkatan produksi dari 31 juta ton CPO pada tahun 2023 menjadi 53 juta ton pada tahun 2045. Dengan demikian, maka total produksi CPO pada tahun 2045 dapat mencapai target 100 juta ton, di mana ada penambahan sebanyak 50,3 juta ton CPO hanya dari strategi intensifikasi yang berbasis peningkatan produktivitas dan peningkatan utilitas lahan. (SN/Dhp)

Menyeimbangkan Alokasi Minyak Sawit, Mungkinkah?



Ilustrasi pergerakan harga CPO (dok. istimewa)

Keseimbangan alokasi minyak sawit antara kebutuhan energi, pangan, dan ekspor adalah hal yang esensial. Program biodiesel setiap tahunnya terus ditingkatkan hingga mencapai B35 pada tahun 2023. Hal ini membuat banyak pihak yang mengkhawatirkan alokasi minyak sawit untuk pangan dan ekspor akan berkurang. Namun sebenarnya, apakah mungkin keseimbangan pemenuhan alokasi minyak sawit antara energi, pangan, dan ekspor tercapai?

Berangkat dari data produksi minyak sawit Indonesia yang dikeluarkan oleh GAPKI, pada tahun 2023 Indonesia memproduksi minyak sawit sebesar 54,8 juta ton. Sementara itu, konsumsi domestik sebesar 23,2 juta ton yang terdiri dari 10,3 juta ton untuk pangan, 2,3 juta ton untuk oleokimia, dan 10,6 juta ton untuk kebutuhan biodiesel. Untuk ekspor minyak sawit dan turunannya, nilai yang tercatat adalah sebesar 31,6 juta ton. Data ini menggambarkan alokasi yang cukup baik dilihat dari keseimbangan antara konsumsi domestik dan ekspor, di mana kebutuhan pangan, energi dan oleokimia dasar pun dapat terpenuhi.

Kontribusi ekspor sawit bagi Indonesia teramat besar. Melalui ekspor sawit yang mencapai 30 juta ton per tahun diperoleh devisa rata-rata dalam 5 tahun terakhir sekitar USD 26 miliar per tahun. Dengan total USD 129 miliar yang setara dengan Rp 1.898 triliun.

Kontribusi sawit lainnya adalah pungutan ekspor (PE) sawit yang menghasilkan pendapatan untuk BPDPSK sebesar 170 triliun dalam 5 tahun, sejak 2016 hingga 2023. Pendapatan inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai program biodiesel, sehingga masyarakat dapat menikmati biosolar dengan harga yang terjangkau di SPBU. Program biodiesel mampu mengurangi impor solar senilai lebih dari Rp 400 triliun sejak BPDPSK didirikan (tahun 2015).

Mengenai keseimbangan alokasi minyak sawit, ada beberapa pihak yang mempertanyakan, antara kebutuhan energi, pangan, atau ekspor. Simulasi

Traction Energy Asia (2024) misalnya, menggambarkan dampak peningkatan bauran biodiesel dapat menimbulkan defisit stok CPO di masa depan, sehingga diperlukan skenario perluasan lahan untuk mengatasi kebutuhan bahan baku. Walaupun sebenarnya, tanpa perluasan lahan pun kenaikan produksi CPO dapat dicapai dengan strategi intensifikasi.

Pada prinsipnya, dalam menyimulasikan keseimbangan alokasi konsumsi minyak sawit, maka pemenuhan kebutuhan pangan dan oleokimia terlebih dahulu dijadikan prioritas utama. Prioritas selanjutnya adalah ekspor. Dari ekspor minyak sawit baik produk mentah maupun turunannya, akan berimplikasi pada devisa negara dan pendapatan BPDPSK melalui PE sesuai amanat UU 39 Tahun 2014.

Sebagaimana diketahui, BPDPSK membutuhkan dana sekitar Rp 34 triliun per tahun untuk membayar selisih antara harga biodiesel dengan harga pasar BBM yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, diperlukan ekspor $\pm$ 30 juta ton per tahun. Sehingga, dengan asumsi harga CPO referensi USD 900 per ton, akan diperoleh pendapatan dari PE sebesar Rp 36 triliun. Kelebihan dana tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi target program PSR dan kebutuhan lainnya.

Setelah memenuhi ketiga alokasi tersebut, maka alokasi untuk program biodiesel dapat ditetapkan, dan dinaikkan dari posisi saat ini, yakni dari B35 menjadi B40 dan seterusnya. Tentunya dengan penyesuaian *feedstock* yang ada.

Maka dari itu, dibutuhkan bahan baku dari sektor hulu, yakni perkebunan. Hanya saja, jika praktik perkebunan yang dijalankan masih seperti saat ini (*Business as Usual* - BAU), maka peningkatan produksi akan sulit tercapai. Perlu adanya penguatan strategi intensifikasi yang dapat mendorong capaian produksi lebih tinggi menuju 100 juta ton CPO melalui program peremajaan (termasuk PSR), dan penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP) yang didukung sertifikasi ISPO. (R)

Peta Jalan Sawit Indonesia Emas & Keberlanjutan



Indonesia Emas 2045 (dok. istimewa)

Sebagai raja sawit dunia, Indonesia kini sedang mempersiapkan sebuah *roadmap* atau peta jalan menuju Indonesia emas yang digadang-gadang akan terjadi saat umur republik ini mencapai 100 tahun. “Keberlanjutan” dijadikan kata kunci semua upaya yang ada sehingga bisa berimbas positif bagi perekonomian nasional.

Pernyataan besar (*big words*) di atas langsung disambar media di tanah air, termasuk oleh kantor berita Antara, 24 Juni 2024. Apalagi yang menyampaikannya Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika.

“Kata kuncinya adalah pengembangan sektor industri yang berkelanjutan (*sustainable*) dan mampu tertelusur (*traceable*) sebagai prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global.”

Putu menjamin bahwa pihaknya akan senantiasa konsisten dalam mengembangkan industri sawit mengingat sektor ini, akunya, menjadi tumpuan pekerjaan 4,2 juta orang dan menghidupi 20,8 juta jiwa masyarakat Indonesia serta menyangga devisa kisaran Rp 750 triliun per tahun, khususnya dari ekspor produk hilir.

Lebih lanjut, dalam laman situs Kemenperin 23 Juni 2024, disebutkan target yang ingin dicapai pada tahun 2045 mendatang, yakni dapat dicapai postur industri kelapa sawit hulu hingga hilir yang berkelanjutan dan sejalan dengan *ultimate goals* pertumbuhan sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju berkeadilan dan inklusif.

Selain itu, kelapa sawit diharapkan paling siap mendukung pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) sektor industri tahun 2050.

Komitmen Dirjen Industri Agro Kemenperin tersebut kemungkinan besar akan disambut dengan positif kalangan Barat, khususnya Eropa dan Amerika. Maklumlah, kedua pihak inilah yang paling getol menjargonkan ketertelusuran dan keberlanjutan.

Tidak hanya itu, melalui mekanisme *Rountable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang lahir 2004, para pembeli sawit dari Eropa diwajibkan tahu asal muasal bahan baku melalui pencatatan seperti titik koordinat lokasi kebun, lokasi pabrik, bahan baku dari petani atau tengkulak, termasuk mengetahui status legalitasnya. Tanpa ada ketertelusuran tersebut, maka kemungkinan besar produk sawit akan ditolak.

Beberapa perusahaan besar sawit diperkirakan dapat memenuhi aneka syarat yang diajukan oleh Uni Eropa, namun pekebun Indonesia yang juga menguasai kisaran 40 persen dari perkebunan sawit yang ada di Indonesia, tentu bukan pekerjaan yang mudah atau malah cenderung memberatkan. Masalah legalitas lahan, replanting hingga ketertelusuran adalah pekerjaan besar yang mesti dikerjakan secara serius dan berkelanjutan.

Mengingat RSPO dianggap tidak terlalu tepat untuk dilaksanakan di Indonesia, maka kemudian pemerintah (2009) mengeluarkan konsep yang semisal yakni *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Lembaga ISPO dibentuk guna memastikan bahwa semua pihak memenuhi standar pertanian yang diizinkan, meliputi pengolahan lahan, pelestarian lingkungan, kepatutan perartuan, hak asasi manusia, kesejahteraan pekerja dan partisipasi masyarakat lokal. Semakin banyak pengusaha mendapatkan sertifikat ISPO, diharapkan penerimaan produk sawit Indonesia di tingkat global meningkat. (MAS)



Pembina: **Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**,
Pemred: **M. Aji Surya**, Redaktur: **Dimas HP, Ahmad Mina**,
Staf Redaksi: **Dwivayani, Oktadianti, Raisya, Aura, Sylvia**
Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id